

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH  
TERHADAP UPAH PEKERJA YANG TIDAK SESUAI  
DENGAN UPAH MINIMUM KOTA/KABUPATEN**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**RIKI TRIA SUSANTO**

**NPM: 19300014**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH  
TERHADAP UPAH PEKERJA YANG TIDAK SESUAI  
DENGAN UPAH MINIMUM KOTA/KABUPATEN**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:

RIKI TRIA SUSANTO

NPM: 19300014

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH  
TERHADAP UPAH PEKERJA YANG TIDAK SESUAI  
DENGAN UPAH MINIMUM KOTA/KABUPATEN**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:  
RIKI TRIA SUSANTO  
NPM: 19300014

SURABAYA, 9 NOVEMBER 2022

MENGESAHKAN,

PEMBIMBING UTAMA,

Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.

PEMBIMBING PENDAMPING,

ARDHIWINDA KUSUMAPUTRA, S.H., M.H.

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH  
TERHADAP UPAH PEKERJA YANG TIDAK SESUAI  
DENGAN UPAH MINIMUM KOTA/KABUPATEN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:  
RIKI TRIA SUSANTO  
19300014

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 9 NOVEMBER 2022  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

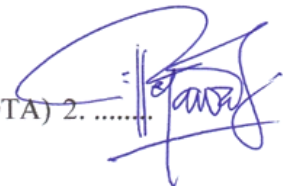
1. NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.Hum.

(KETUA)

1. ....  



2. DESY NURKRISTIA TEJAWATI, S.H., M.Kn.

(ANGGOTA) 2. ....



3. ARDHIWINDA KUSUMAPUTRA, S.H., M.H.

(ANGGOTA) 3. ....



## **MOTTO**

*“ Segalanya akan menjadi mudah bila kita bisa bersabar dan terus berusaha. Karena segala masalah yang timbul, Tuhan tidak akan memberikan jalan yang buntu, namun akan selalu ada jalan yang Tuhan siapkan. Kita hanya dapat menunggu dan tetap berusaha ”.*

*Riki Tria Susanto*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-nya, sehingga skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP UPAH PEKERJA YANG TIDAK SESUAI DENGAN UPAH MINIMUM KOTA/KABUPATEN” dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL(K), FICS yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H. M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H. dan Ardhiwinda Kusumaputra, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan, pengetahuan selama perkuliahan dan selama menyelesaikan skripsi ini.
4. Isetyowati Andayani, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang senantiasa mendampingi, mendampingi, dan mengarahkan penulis agar dapat mengikuti perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dukungan semangat dan doa yang terbaik.
7. Teman-teman selama masa perkuliahan Fahmi, Angga, Krisna, Bagas, Ari, Echa, Desi, Gaza, Nafia, Vania, Nabila, Evalia, Jihan, Astrid, Devi, Ellen,

Pande dan masih banyak lagi yang selalu ada untuk menemani, membantu dan menghiasi hari-hari saya selama masa perkuliahan dari semester awal hingga akhir.

8. Teman-teman “SEPI” Careen, Shifa, Gita, Anisa, Fahmi, Krisna, Angga, dan Bagas yang selalu support pekerjaan apapun namun positif dan bermanfaat.
9. Teman kerja Yuni yang selalu memberikan nasehat dari segala pengalamannya.

Akhir kata saya ucapkan terimakasih dan semoga kebaikan kalian dibalaskan oleh Allah S.W.T dan saya sebagai penuli memohon maaf apabila dalam skripsi ini masih ditemukan banyak kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang membutuhkan.

Hormat Saya,  
Penulis

Riki Tria Susanto

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Riki Tria Susanto  
NPM : 19300014  
Alamat : Jl. Simo gunung kramat timur VIII/34 Surabaya  
No. Telp. (HP) : 081333350808

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP UPAH PEKERJA YANG TIDAK SESUAI DENGAN UPAH MINIMUM KOTA/KABUPATEN” adalah murni gagasan yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 9 November 2022

Yang menyatakan,



RIKI TRIA SUSANTO  
NPM:19300014



## **ABSTRAK**

Penulisan ini berjudul Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Terhadap Upah Pekerja Yang Tidak Sesuai Dengan Upah Minimum Kota/Kabupaten dengan hal yang melatarbelakangi adalah perhatian penulis terhadap bagaimana pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap upah yang dibayarkan lebih rendah dari upah minimum sehingga terciptalah perumusan penulisan ini dengan tujuan, Pertama mengetahui bentuk tanggungjawab pemerintah daerah terhadap upah pekerja yang tidak sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota. Kedua mengetahui upaya hukum dari pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab untuk menanggulangi perusahaan yang tidak membayar upah sesuai upah minimum kabupaten/kota.

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode Penelitian Hukum-Normatif yang menggunakan analisa pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan seperti ketetapan, keputusan, dan aturan hukum yang keabsahannya dapat dipertimbangkan.

Sesuai dengan permasalahan, khususnya pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap upah minimum yang dibayarkan lebih rendah oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Berdasarkan hasil penulisan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah berwenang dalam menetapkan besaran upah minimum. Gubernur memiliki wewenang dalam menetapkan upah minimum daerahnya. Pengusaha dilarang untuk membayarkan upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditentukan. Pemerintah daerah akan memberikan sanksi administratif hingga upaya pidana terhadap pelanggaran yang ada.

Kata Kunci: Upah, Kewenangan, Pemerintah Daerah

## **ABSTRACT**

*This writing is entitled Local Government Accountability for Workers' Wages That Are Not In Accordance With the City/District Minimum Wage with the background being the author's attention to how the local government's accountability for wages paid is lower than the minimum wage so that the formulation of this paper is created with the aim of, First knowing the form of responsibility local government against workers' wages that are not in accordance with the district/city minimum wage. Second, knowing the legal efforts of the local government as a form of responsibility to deal with companies that do not pay wages according to the district/city minimum wage.*

*The writing method used in this thesis uses the Legal-Normative Research method that uses an analysis of the rules of law and legislation such as statutes, decisions, and legal rules whose validity can be considered.*

*In accordance with the problems, in particular the accountability of local governments to the lower minimum wages paid by employers to workers/ laborers. Based on the results of the writing, it can be concluded that the local government has the authority to determine the minimum wage. The governor had authority in stipulating the minimum wage of his region. Employers are prohibited from paying wages lower than the minimum wage that has been determined. Local governments will provide administrative sanctions to criminal measures against existing violations.*

*Keywords: Wages, Authority, Local Government*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI .....	iii
MOTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vii
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I. Latar Belakang .....	1
II. Rumusan Masalah .....	12
III. Tujuan Penelitian .....	12
IV. Manfaat Penelitian .....	13
A. Manfaat Praktis .....	13
B. Manfaat Akademis .....	13
V. Kerangka Konseptual .....	14
A. Tanggung Jawab Negara/Pemerintah .....	14
B. Kewenangan .....	16
C. Hak dan Kewajiban Pekerja .....	18
D. Otonomi Daerah .....	20
E. Asas Pelaksanaan Pemerintahan Daerah .....	21
VI. Metode Penelitian .....	23
A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan .....	23
B. Bahan Hukum .....	24
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	26
D. Analisa Bahan Hukum .....	26
VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	27

BAB II	BENTUK TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP UPAH PEKERJA YANG TIDAK SESUAI DENGAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA .....	29
I.	Pengaturan Kewenangan Pemerintahan Daerah Terhadap Upah Pekerja .....	29
II.	Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Upah Pekerja/Buruh .....	40
III.	Pendapat Penulis .....	48
BAB III	UPAYA HUKUM DARI PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB UNTUK MENANGGULANGI PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMBAYAR UPAH SESUAI UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA .....	52
I.	Upaya Hukum Secara Administratif Oleh Pemerintah Daerah Ketika Terjadi Pelanggaran Di Tingkat Daerah Oleh Perusahaan .....	52
II.	Penindakan Oleh Pemerintahan Daerah .....	57
A.	Penyelesaian Dalam Perselisihan Hubungan Industrial ....	59
B.	Meningkatkan Efektifitas Kinerja Pengawas Ketenagakerjaan .....	61
III.	Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pelanggaran Pengupahan .....	64
IV.	Pendapat Penulis .....	68
BAB IV	PENUTUP .....	72
I.	Kesimpulan .....	72
II.	Saran .....	74
DAFTAR PUSTAKA		